

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS TO GOVERNMENT PERFORMANCE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE MANADO

Oleh:

Brejita Mamuja¹

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail : 1jitadifia@gmail.com

Abstrak : Pengelolaan keuangan negara/ daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem pengendalian. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas DISPENDA Kota Manado telah efektif dan memadai. Sebaiknya petugas – petugas DISPENDA melakukan pemeriksaan dan pemantauan penerimaan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini.

Kata kunci : pengendalian intern, efektivitas, kinerja

Abstract : Financial management of the country / region that is effective, efficient, transparent and accountable should be applied in the implementation of government activities to determine the extent of effectiveness of the control system. Internal controls at the national and regional governments based on the Government Regulation No. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The aim of research to analyze the effectiveness of the implementation of the internal control system on the performance of the Department of Revenue (DISPENDA) in the city of Manado. This study uses qualitative descriptive method. The results showed that the internal control system implemented by the Office of Manado City DISPENDA has been effective and adequate. Preferably officers - officers DISPENDA inspection and monitoring of acceptance as often as possible, so that if a problem occurs can be determined early.

Keywords : internal control, effectiveness, performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma atau pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam masyarakat modern antara lain: adanya keterbukaan (*transparansi*), peningkatan efisiensi, tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Paradigma tersebut mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah serta dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Perlu diterapkan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/ daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Otonomi daerah di Indonesia yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Pengendalian Intern.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern adalah pengawasan tersebut tidak sesuai dengan pedoman tujuan dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pengendalian Intern. Instansi Pemerintah yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Alasan mengapa mengambil objek DISPENDA, karena dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah melaksanakan Pengendalian Intern dalam mengukur Kinerjanya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pada kinerja Dinas Pendapatan Daerah di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Pengendalian Intern

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern termasuk salah satu bagian dari pengendalian Intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Mulyadi (2001:183), mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Rama dan Jones (2008) yang diterjemahkan oleh M. Slamet Wibowo menjelaskan, pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang bera lasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat reasonable assurance mengenai:

- a. Efektifitas dan efisiensi operasional
- b. Reliabilitas pelaporan keuangan
- c. Kepatuha atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

Berdasarkan beberapa pengertian pengendalian internal diatas, terdapat beberapa konsep dasar, diantaranya :

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya berbentuk kebijakan manual saja tetapi merupakan orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai. Maksudnya yaitu bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem 10 pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan pengendalian.
4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Tujuan Pengendalian Intern

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) (1982), menyatakan Pengendalian Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu system pengendalian intern yang baik itu akan berguna untuk :

- a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- c. Memajukan efisiensi dalam operasi.
- d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008

- a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revui, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UU No. 60 Tahun 2008 Umum SPIP terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pengertian Efektivitas

Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pengertian Kinerja

Waluyo (2006) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu rencana. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kinerja. Bastian (2006), menjelaskan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi dan sebagainya
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Trisnawati (2012) melakukan penelitian Sistem pengendalian intern dengan metode deskriptif analitis dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah melakukan berbagai macam terobosan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pegawai serta mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang berpengaruh positif bagi sistem pengendalian yang ada didalam dinas serta menekan tindakantindakan yang tidak sesuai dengan kegiatan kedinasan. Margaretha (2013) melakukan penelitian efektifitas pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sinar Galesong Prima Manado. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas telah efektif, berlawanan dengan pengendalian intern pengeluaran kas. Sedangkan Sistem pengendalian intern pengeluaran kas belum efektif, karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian intern di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi-referensi yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam mengukur kinerja pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan Pengendalian Intern dalam mengukur Kinerjanya. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan lokasi berada di Manado dimana penulis menetap sehingga waktu dapat dimanfaatkan seefisien

mungkin. Waktu yang digunakan selama penelitian kurang lebih dua bulan dari bulan November sampai dengan Desember 2015.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap pegawai DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado), pengamatan lewat jasa internet, serta di Perpustakaan, buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem Pengendalian Internal dalam penerimaan pada DISPENDA Kota Manado

Dalam pengawasan yang dilakukan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado terdapat :

a. Lingkungan Pengendalian

Dalam lingkungan pengendalian, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam system penerimaan pendapatan daerah. Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut maka diterapkan unsur-unsur Integritas dan Nilai Etika. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado menerapkan integritas dan nilai etika pada seluruh pegawainya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manajemen berupa tata cara kepegawaian mengenai etika dan perilaku. Aturan-aturan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada setiap pegawai, yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai. Apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka kepada pegawai tersebut akan diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau surat peringatan.

b. Penaksiran Risiko

a) Teknologi Baru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah menyediakan dana khusus dalam pengadaan teknologi sebesar yang diperlukan. Hal ini dilaksanakan agar kegiatan operasional penerimaan serta hal-hal yang menyangkut pembuatan laporan dapat berjalan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang baik.

b) Perubahan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah melaksanakan restrukturisasi organisasi yang memadai. Perubahan struktur organisasi dilakukan agar karyawan terhindar dari risiko kejenuhan dalam bekerja yang akan berdampak pada menurunnya kinerja pegawai. Selain itu mutasi dilakukan agar semua pegawai dapat menguasai kegiatan yang ada pada bagian lainnya.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh perusahaan daerah Dinas Pendapatan Daerah telah dilaksanakan. Unsur-unsur pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendalian Dinas Pendapatan Daerah adalah :

Pemisahan tugas yang cukup menunjukkan adanya pemisahan fungsi khususnya bagian-bagian yang terkait dengan pengendalian internal dan penerimaan pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1) Bidang Pajak dan Retribusi

Mengendalikan objek pajak / retribusi dalam bentuk kartu data, dan melakukan pengawasan, perhitungandan penetapan potensi pajak/ retribusi, melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak / retribusi daerah, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan administrasi pajak/ retribusi daerah.

2) Bidang Pembukuan

Menyusun laporan realisasi penerimaan daerah tahunan, dan membuat pembukuan masing-masing sumber pajak / retribusi sesuai bukti setoran, serta pengawasan dan pengendalian seluruh bukti setoran.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado mulai dari entry data-data yang berhubungan dengan wajib pajak, dan jumlah pajak retribusi. komunikasi yang dilakukan oleh DISPENDA terhadap wajib pajak, biasanya dilakukan secara langsung petugas dinas luar, atau alat komunikasi tidak langsung seperti telepon.

e. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh DISPENDA adalah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penerimaan pendapatan daerah oleh wajib pajak, seperti penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan, maupun kegiatan lainnya (secara fisik). Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan DISPENDA Kota Manado maupun wajib pajak. DISPENDA secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan penerimaan pendapatan daerah Kota Manado, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penerimaan pendapatan daerah Kota Manado, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik.

Pembahasan

a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern di Dispenda Kota Manado Sesuai Unsur – Unsur Pengendalian Intern UU 60 Thn 2008

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pengendalian Intern :

1. Pemisahan tugas yang cukup

Dalam sistem dan prosedur penerimaan dapat dilihat sudah ada pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur penerimaan pajak daerah yaitu pemisahan tugas penerima pajak oleh bagian Bendahara Penerima dan Bank, pencatatan pada bagian Administrasi, dan penyimpanan pada bagian Kas Daerah. Dibandingkan dengan penelitian yang lain dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan transaksi, jadi pemisahan tugas telah dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Tapi dalam pemisahan tugas masih terdapat kekurangan, yaitu penerimaan pajak daerah yang diterima oleh dua pihak yaitu Bendahara Penerima dan Bank. Sebaiknya yang menerima pajak pihak bank, karena setiap hari setelah menerima pendapatan pajak daerah, Bendahara Penerima akan menyetor ke Bank. Jadi sebaiknya pihak yang menerima pajak daerah hanya pihak Bank saja.

2. Sistem dan Prosedur yang Jelas

Sistem dan Prosedur pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sangat baik, hal ini dilihat dari prosedur pembagian tugas dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah yang sangat jelas dan terakodir, dibandingkan dengan penelitian yang lain dalam syarat Sistem dan Prosedur yang baik harus adanya pembagian tugas dan wewenang yang mencapai tujuannya dengan cara yang sederhana, membagi pekerjaan secara logis dan mudah dipahami sehingga bakat karyawan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi, sistem dan prosedur yang jelas telah dilakukan oleh DISPENDA Kota Manado.

b. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Kota

Dalam sistem pengendalian intern ketaatan terhadap peraturan- peraturan yang berlaku merupakan suatu tujuan dari penerapan sistem ini. Dinas Pendapatan Kota Manado telah menerapkan dan menjalankan sesuai dengan PP 60 Thn 2008 dilihat dari terpenuhinya unsur – unsur pengendalian intern mulai dari lingkungan pengendalian dimana Dinas Pendapatan Daerah menerapkan integritas dan nilai etika pada seluruh pegawainya. Untuk mengoptimalkan kinerja pegawainya Dinas Pendapatan Kota Manado melakukan evaluasi terhadap prestasi pegawainya. Dalam pemantauannya Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan penerimaan pendapatan daerah Kota Manado, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penerimaan pendapatan daerah Kota Manado, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah: Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah telah efektif dalam menunjang kinerja instansi pemerintah sesuai dengan unsur – unsur dalam sistem pengendalian intern Pemerintah UU 60 Tahun 2008.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Formulir pendaftaran wajib pajak sebaiknya dibuat menjadi dua rangkap, agar wajib pajak memiliki bukti sebagai pendaftaran.
2. Untuk lebih efektif ada baiknya jika pemeriksaan dan pemantauan penerimaan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat di ketahui secara dini.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. 1982. Confication of Statement on Auditing standards. *Artikel*. <http://www.scribd.com/doc/164174182/Sistem-Pengendalian-Internal#scribd>. Diakses pada 22 Maret 2016. Hal. 1
- Bastian. 2006. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). *Skripsi*. <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/analisis-penerapan-penganggaran-berbasis-kinerja.pdf>. Diakses pada 22 Maret 2016. Hal. 1.
- Margaretha. 2013. Efektifitas Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran kas pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2837>. Diakses 17 maret 2016. Hal.1007-1015
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32, tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60, tentang Sistem Pengendalian Internal. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Nomor 02, tentang Pajak Daerah. Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Walikota Nomor 14, tentang Rincian tugas dan Fungsi Dinas. Manado.
- Rama dan Jones. 2008. Pengendalian Intern. *Artikel*. <http://fernandesocto.blogspot.co.id/2013/02/sistem-pengendalian-intern.html>. Diakses 17 maret 2016. Hal. 1.
- Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Trisnawati. 2012. Pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah*. [http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2424/CONTENT%20RIN A.pdf?sequence=5](http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2424/CONTENT%20RIN%20A.pdf?sequence=5). Diakses 16 Maret 2016. Hal 139-151.
- Waluyo. 2006. Penilaian Kinerja Keuangan. *Artikel*. <http://aksiputer.blogspot.co.id/2008/03/penilaian-kinerja-keuangan-analisis.html>. Diakses 22 Maret 2016. Hal. 1.